

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Bursa Efek Indonesia

Dalam *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dijelaskan bahwa secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Bursa efek atau bursa saham adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu. Bursa efek tersebut bersama-sama dengan pasar uang merupakan sumber utama permodalan eksternal bagi perusahaan dan pemerintah.

Untuk membantu perusahaan dan pemerintah dalam hal permodalan eksternal tersebut, Bursa Efek Indonesia memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik dan mencatatkan sahamnya di bursa atau dikenal dengan nama *go public*. Bursa Efek Indonesia mensyaratkan beberapa persyaratan kepada setiap perusahaan untuk dapat menjadi perusahaan publik, sehingga saham perusahaan tersebut dapat *dilist* dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Salah satu persyaratannya adalah menyajikan laporan keuangan auditan tahun buku terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari akuntan publik yang terdaftar di Bapepam.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari satu tahun) seperti saham, obligasi, waran, *right*, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option* dan *futures*. Di Indonesia terdapat bursa efek yang bernama Bursa Efek Indonesia disingkat BEI atau *Indonesian Stock Exchange* (IDX) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek

Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Melalui penggabungan tersebut diharapkan pasar modal di Indonesia lebih kuat dan efisien. Pasar modal diharapkan tidak hanya sebagai alternatif bagi pendanaan dan sarana berinvestasi, namun mampu menjadi cermin pergerakan ekonomi nasional. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

Sistem perdagangan di bursa efek saat ini lebih modern dengan menggunakan jaringan elektronik yang memberikan keuntungan dari segi kecepatan dan biaya transaksi. Sistem perdagangan efek otomatis di Bursa Efek Indonesia adalah JATS (*Jakarta Automated Trading System*). JATS merupakan sistem perdagangan efek yang berlaku di bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer. JATS akan menerima order jual dan beli.

Pemilihan Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian karena Bursa Efek Indonesia mengakomodir hampir seluruh emiten yang *go public* secara nasional. Keragaman jenis industri dari emiten membuat penelitian ini terspesialisasi pada sektor perbankan. Dari sektor perbankan tersebut peneliti ingin mengetahui pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan. Informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut dapat peneliti peroleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di *website* Bursa Efek Indonesia.

1.1.2 Perusahaan Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Lembaga perbankan Indonesia terdiri atas Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Darmawi, 2011:1).

Bank Sentral adalah bank yang mempunyai tugas sebagai Pengawas Perbankan. Sebagai otoritas moneter, Bank Sentral tidak melakukan usaha perbankan umum, dalam arti tidak menghimpun dana dari masyarakat, dan tidak memberikan kredit kepada masyarakat. Di Indonesia yang bertindak sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia (Darmawi, 2011:1).

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Darmawi, 2011:1). Jumlah Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2013 sebanyak 32 perusahaan (www.idx.co.id).

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Darmawi, 2011:1).

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (www.bi.go.id).

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko. Dengan adanya pendekatan berdasarkan risiko tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan (www.bi.go.id).

1.2 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memaksimalkan kekayaan pemiliknya atau pemegang saham dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan

ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan. Untuk menilai kinerja perusahaan, maka dilakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari menganalisis laporan keuangan perusahaan, yaitu untuk menilai atau mengevaluasi suatu kinerja khususnya manajemen perusahaan dalam suatu periode akuntansi, serta menentukan strategi apa yang harus diterapkan pada periode berikutnya jika tujuan perusahaan sebelumnya telah tercapai. Begitu juga dengan perusahaan perbankan yang mempunyai regulasi yang ketat bila dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya (Wijayanti dan Mutmainah, 2012).

Laporan keuangan perusahaan perbankan digunakan oleh Bank Indonesia untuk menilai apakah bank tersebut termasuk dalam perusahaan yang sehat atau tidak. Keadaan yang seperti ini banyak dimanfaatkan oleh para manajer untuk melakukan manipulasi data dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan yang berada di bawah tanggung jawab manajer tersebut masuk dalam kriteria yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Untuk meminimalisasi adanya manipulasi data oleh para manajer dan untuk mensejahterakan para pemilik dan pemegang saham, maka cara yang tepat digunakan adalah *Corporate Governance* (Wijayanti dan Mutmainah, 2012).

Penerapan *Corporate Governance* dapat memberikan kepercayaan kepada pemilik perusahaan terhadap kemampuan manajemen dalam mengelola kekayaan yang dimiliki oleh pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalisasi konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*) (Susiana dan Herawaty, 2007; dalam Novian dan Septiani, 2013). Konflik kepentingan dan biaya keagenan berhubungan dengan teori keagenan, dimana teori tersebut menjelaskan bahwa terdapat pemisahan antara pemilik dengan manajer atau dapat dikatakan bahwa hubungan antara pemilik dengan manajer sulit terbangun karena adanya benturan kepentingan.

Dalam teori keagenan diasumsikan bahwa antara pemilik dan manajer mempunyai keinginan untuk mementingkan kepentingan sendiri. Pemilik dapat menilai, mengukur dan mengawasi sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh manajer untuk kepentingannya dan sebagai dasar untuk pemberian kompensasi

atas kinerja manajer. Penilaian tersebut dapat dilakukan melalui laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya.

Manajer diharapkan oleh pemilik untuk menyajikan informasi secara wajar, tetapi manajer mungkin takut mengungkapkan informasi yang tidak diharapkan oleh pemilik sehingga menimbulkan kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus dan tidak dapat terdeteksi oleh pemilik dan auditor, maka akan merugikan pemilik dan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang semakin lama semakin memburuk sehingga diragukan keberlangsungan hidup perusahaan. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka dibutuhkan pihak ketiga yang independen (akuntan publik) yang bertugas memberikan jasa untuk menilai laporan keuangan yang dibuat oleh manajer sehingga hasil penilaian tersebut dapat dituangkan dalam bentuk opini audit.

Sedangkan untuk melakukan analisis perusahaan, di samping dilakukan dengan melihat laporan keuangan perusahaan, juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Dari sudut pandang investor, salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa datang adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Indikator ini sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor. Untuk itu, biasanya digunakan dua rasio profitabilitas utama, yaitu : (1) *Return On Equity* (ROE), yang menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham, dan (2) *Return On Assets* (ROA), yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba (Tandelilin, 2010:372).

Rasio ROA lebih dipilih karena merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang mengukur laba perusahaan yang dihasilkan dalam setiap pemanfaatan asetnya. Laba atau keuntungan bisnis merupakan tujuan utama suatu perusahaan beroperasi sehingga dengan diperolehnya laba yang besar telah dapat mencerminkan bahwa perusahaan telah mencapai kinerja yang baik. Hasil

penelitian Ulum (2008) juga menunjukkan bahwa ROA merupakan indikator yang paling signifikan untuk menjelaskan variabel kinerja keuangan perusahaan (Ningrum dan Rahardjo, 2012).

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair* (Dewayanto, 2010).

Dalam *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*, (*Improving Audit Committee Performance: What Works Best – A Research Report prepared by Pricewaterhouse Coopers, the Institute of Internal Auditors Research Foundation* dalam Sam'ani, 2008).

Institusi keuangan perbankan memiliki sifat usaha spesifik (*nature of the firm*) yang membedakannya dari institusi non-keuangan (Macey dan O'Hara, 2003; dalam Supriyatno, 2006). Sifat usaha spesifik tersebut mendorong topik penelitian dalam industri perbankan dewasa ini mengarah pada masalah *Corporate Governance*, terlebih lagi setelah beberapa negara Asia terkena krisis finansial (Arun dan Turner, 2003; dalam Supriyatno, 2006). *Corporate Governance* pada industri perbankan di negara berkembang seperti halnya Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin

pertumbuhan ekonomi (King dan Levin, 1993; dalam Sam'ani, 2008). Kedua, di negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun deregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan operasi bank (Arun dan Turner, 2003; dalam Supriyatno, 2006).

Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI) atau indeks persepsi korupsi 2012 yang disurvei oleh TI. Hasilnya cukup mencengangkan karena Indonesia masih menjadi negara korup dengan korupsi yang semakin parah. Survei CPI tahun 2012 dilakukan terhadap 174 negara di dunia dan Indonesia mendapatkan skor CPI 32 dengan peringkat 118. Artinya, dengan skor 32 itu Indonesia belum dapat keluar dari situasi korupsi yang sudah mengakar. Di posisi ASEAN, Indonesia sendiri buruk jika dibandingkan dengan Singapura (skor 87, peringkat 5), Brunei Darussalam (skor 55, peringkat 46), Malaysia (skor 49, peringkat 54), Thailand (skor 37, peringkat 88) dan Filipina (skor 34, peringkat 108). Indonesia berada diatas Vietnam (skor 31, peringkat 123) dan Myanmar (skor 15, peringkat 172) (nasional.sindonews.com).

Industri perbankan merupakan industri yang sarat dengan peraturan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan kesinambungan usaha. Oleh karena itu, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Mengacu pada hal tersebut, menyebabkan industri pada sektor perbankan menyadari betapa pentingnya peran *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai suatu landasan dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan kelangsungan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa yang akan datang khususnya dalam sektor industri perbankan. Pengabaian implementasi GCG dan lemahnya kualitas GCG dalam suatu perusahaan telah menyebabkan terjadinya kegagalan perusahaan-perusahaan besar dalam mempertahankan eksistensinya khususnya pada saat terjadinya krisis, hal

ini disadari oleh industri perbankan sehingga membuat banyak industri perbankan sudah menerapkan GCG dalam perusahaannya.

Di Jakarta, sebanyak 30 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) diumumkan sebagai top 30 emiten dengan skor *Corporate Governance* (CG) tertinggi 2013. GCG ini, diikuti oleh 97 emiten. Adapun skor tersebut berdasarkan hasil penelitian *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) menggunakan acuan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dalam menilai praktik CG perusahaan terbuka di Indonesia. Dalam peringkat 30 besar emiten dengan skor CG tertinggi memang diakui didominasi oleh sektor perbankan dan BUMN. Adapun penilaian yang dilakukan dalam menentukan peringkat dengan skor CG tertinggi diperoleh dari penilaian hak-hak dari pemegang saham, peran pemangku kepentingan, keterbukaan dan transparansi, tanggung jawab dewan direksi dan komisaris (tetapi lebih ke komisaris sebagai pengawas dan regulator). Ada 13 perusahaan pada sektor perbankan yang masuk dalam 30 emiten dengan skor CG tertinggi (economy.okezone.com).

Sebelum diumumkannya peringkat skor CG tertinggi 2013 yaitu lima tahun yang lalu, terdapat kasus yang melibatkan jajaran Komisaris dan Direksi perbankan tepatnya pada kasus Bank Century yang terjadi tahun 2008 dimana Bank Century mengalami kebangkrutan akibat kekurangan likuiditas dan pemburukan aset. Diawali dengan pemberian *bail out* atau dana penyertaan oleh pemerintah kepada Bank Century yang membengkak hingga Rp 6,7 triliun dari semula hanya Rp 1,3 triliun. Hal tersebut belakangan diketahui karena mantan Direktur Utama dan Komisaris Utama yang juga Pemegang Saham telah menggelapkan dana nasabah. Tidak hanya itu, Komisaris Utama yang juga Pemegang Saham Robert Tantular dianggap telah mempengaruhi pejabat bank untuk tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (www.tempo.co).

Setelah diumumkannya peringkat skor CG tertinggi 2013 pun masih ada kasus pada dunia perbankan tepatnya pada Bank BJB. Tiga dewan komisaris Bank Jabar Banten (BJB) diperiksa penyidik dari Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, Selasa (27/8/2013). Mereka dimintai keterangan

sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi pembangunan kantor cabang BJB berlabel T Tower yang rencananya berdiri di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Kasus dimulai saat tahun 2006 bank BJB berencana memiliki kantor cabang khusus di Jakarta. Bank Indonesia pun menyetujui menganggarkan dana Rp 200 miliar untuk pengadaan tersebut. Bank BJB lalu memutuskan membeli 14 dari 27 lantai Gedung T-Tower yang akan dibangun di Jalan Gatot Subroto Kav 93 Jaksel. Belakangan terungkap pembelian lahan itu bermasalah karena lahan itu telah dimiliki perusahaan lain (news.detik.com).

Penelitian mengenai pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan ternyata masih beragam. Menurut Kusumawati dan Riyanto (2005) dalam Novian dan Septiani (2013) serta Chtourou *et al* (2001) dalam Dewayanto (2010) ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan menurut Dewayanto (2010) serta Sundgren dan Wells (1998) dalam Bukhori dan Raharja (2012) ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut penelitian Bukhori dan Rahardja (2012) serta Novian dan Septiani (2013) ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan juga masih beragam. Penelitian Dwivedi dan Jain (2005) serta Black *et al* (2005) dalam Suhardjanto dan Anggitarani (2010) menyatakan bahwa ukuran Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, begitu pula dengan penelitian Pathan *et al* (2007) dalam Santoso (2012) menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran Komisaris Independen dengan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan penelitian menurut Dewayanto (2010) serta Ningrum dan Rahardjo (2012) menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian menurut Wijayanti dan Mutmainah (2012) serta Suhardjanto dan Anggitarani (2010) menyatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sedangkan penelitian mengenai pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan juga masih beragam. Penelitian menurut McMullen (1996)

dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) serta Sam'ani (2008) dalam Arifani (2013) Komite Audit secara positif dan signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Hasil tersebut berlawanan dengan penelitian Novian dan Septiani (2013) serta Wijayanti dan Mutmainah (2012) bahwa ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dari penjelasan dan fenomena serta beragamnya hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit yang termasuk dalam organ perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa *Corporate Governance* yang baik menunjukkan kinerja bank yang baik pula sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi pada bank tersebut. Selain itu, sektor perbankan berbeda dengan sektor industri lain, sektor perbankan merupakan mesin pertumbuhan ekonomi negara dan merupakan lembaga kepercayaan bagi para nasabah, oleh karena itu pengawasannya dilakukan dengan lebih ketat.

Melihat hasil penelitian yang masih beragam serta pentingnya keberadaan Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit dalam sebuah perusahaan terutama sektor perbankan, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan kinerja keuangan pada perusahaan sektor perbankan tahun 2010 sampai 2012 ?
2. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan ?

3. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan ?
4. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan kinerja keuangan pada perusahaan sektor perbankan tahun 2010 sampai 2012.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan.
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan.

1.5.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran kepada para pemegang saham dari perusahaan yang ingin menerapkan konsep *Good Corporate Governance*.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi khususnya dalam menilai kinerja suatu bank.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan dengan jelas, ringkas dan padat mengenai landasan teori tentang *Good Corporate Governance* dan variabel penelitian yaitu Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan kinerja keuangan. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian

dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut merupakan hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan. Bab ini juga menjelaskan deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite Audit) terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Perusahaan).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian dan saran secara kongkrit yang diberikan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan dalam aspek praktis dan tujuan pengembangan ilmu serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.